



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
RENCANA KERJA (RENJA)**

2024



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU**

KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan hidayah ALLAH SWT, Tim Penyusun dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 beserta Sumber Dana Indikatif, Indikator dan Evaluasi Kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu serta tolok ukur dalam merealisasikan Rencana Kerja yang direncanakan. Selain itu juga dapat membuka informasi tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan sekaligus menilai dan mengukur keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan pada setiap tahun anggaran.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi mulai dari awal perencanaan hingga akhir penyusunan Rencana Kerja ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi manfaat.

Belopa, 2023

**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian**

**Ir. H. Muhammad
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip: 19660615 199309 1 002**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan	1-7
1.4 Sistematika Penulisan	1-7
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	2-1
2.2 Analisa Pelayanan Perangkat Daerah	2-15
2.3 Isu-Isu Penting Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu	2-18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	2-23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	2-27
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 3-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	3-2
3.3 Program dan Kegiatan	3-2
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	4-1
 BAB V PENUTUP	 5-1
5.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	5-1
5.2. Program dan Kegiatan	5-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020, maka sebagai tindak lanjut seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu harus segera menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan menjadikan RKPD tersebut sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Bahwa Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2024 terkait kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik, maka Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju yang mendukung suksesnya pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024, sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 050/ 57 /BAP/IV /2023 pada tanggal 10 April 2023 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 diawali dengan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya melaksanakan analisis gambaran pelayanan, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal RKPD. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kebijakan Pemerintah Pusat/ Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Luwu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam mendukung Misi ke 1 Bupati Luwu yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel**.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
25. Peraturan Bupati Luwu Nomor 134 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.
26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020.
27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
- c. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah dan terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa 1 (satu) tahun mendatang; dan
- d. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan.

2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah :

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antar bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam pengelolaan teknologi informatika, statistik sektoral dan persandian;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan teknologi informatika, statistik sektoral dan persandian; dan
- d. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran Umum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar Substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian Ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang Mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah serta Pedoman yang dijadikan Acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Susunan Garis Besar Isi Dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Triwulan IV dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisa Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun Berkenaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2022 sudah berjalan sebagian dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Sebagaimana yang direncanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/ Material
- Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

a. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Pengembangan Infrastruktur

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Secara Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi rencana kerja. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilakukan melalui pengukuran kinerja program dan kegiatan pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2022 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(Rentra Perangkat Daerah) Tahun 2019- 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022			
							Target Renja Tahun 2021		Realisasi Renja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program s/d di Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	8.811.016.808			100	3.288.802.370	100	3.149.057.070	95,75	100	100	3.158.389.164	100,02	3.159.089.388		10,58
2.16.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	36.954.260			100	28.916.650	100	28.057.550	98,32	100	100	13.64.600	99,05	13.515.175		14,40
2.16.01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	6	24.074.350			2 Dokumen	18.175..350	2	17.837.150	96,14	96	2 Dokumen	12.219.800	99,18	12.188.850		15,17

2.16.01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	6	5.125.500			1 Dokumen	5.124.500	1	5.079.500	99,12	99	1 Dokumen	1.324.800	97,81	1.295.825		22,40
2.16.02.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun(LKjIP)		7.754.410			1 Dokumen	5.254.410	1	5.158.900	98,18	98	1 Dokumen	0	0			0,68
2.16.03. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.090.756.009			100	2.629.401.349	100	2.499.085.556	95,04	100	100	2.831.029.439	98,77	2.796.330.273		24,99
2.16.03. 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	OB	2.857.214.409			35	2.619.694.849	35	2.489.478.456	95,03	95	35 Orang	2.648.690.439	98,70	2.614.141.473		27,06
2.16.03. 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi	Jumlah Jenis Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	2 Jenis	211,680.00			2 Jenis	0	2	0	0	0	11 Jenis	165.960.000	100	165.960.000		0,78

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024

	Kuangan SKPD	Kuangan SKPD																
2.16.03. 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun yang disusun	5 Laporan	10.000.000			1 Laporan	2.569.000	1	2.505.000	97,51	98	1 Laporan	1.525.400	100	1.525.400		0,65
2.16. 03. 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	70 Laporan	11.861.600			14 Lapopran	7.137.500	14	7.102.100	99,50	100	14 Laporan	14.853.600	968,99	1.805.500		20,69
2.16.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	526.450.226			100	277.140.810	100	271.814.729	98,85	100	100	160.484.460	122,59	196.740.485		0,99
2.16.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	70 Jenis	6.328.700			12Jenis	5.754.00	12	5.753.000	99,98	100	4 Jenis	37.150.000				0,90

2.16.01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	75 unit	28.004.240			13 Unit	145.130.000	13	140.130.000	96,53	97	0	0	98,45	786		5,00
2.16.01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	7 Jenis	5.000.000			0	0	0	0	0	0	16 Jenis	798.4	0	0		0,15
2.16.01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor dalam 1 (satu) Tahun	60	3.120.000			0	0	0	0	0	0	12 Bulan	3.899.850	99,63	3,885.60		0,96
2.16.01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan dalam 1 (satu) Tahun	20 Jenis	6.750.500			4 Jenis	5.012.000	4	4.975.300	99,50	99	12 Jenis	2.220.000	99,10	2.200.000		18,08

2.16.01.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 Jenis	10.950.000			4 Jenis	7.100.000	4	7.040.000	99,15	99	12 Jenis	1.800.000	100	1.800.000		13,76
2.16. 01. 2.06. 07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/ Material	125 Jenis	16.780.500			25 Jenis	14.394.450	25	14.345.650	99,66	100	12 Jenis	13.444.510	99,32	13.352,570		2,32
2.16.01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/ diikuti	220 OK	451.515.956			42 OK	91.760.450	42	91.633.629	99,86	100	42 OK	138.321'.700	99,97	138.273.815		0,66
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	388.323.501			100	283.118.501	100	279.861.785	98,85	100	100	126.603.878	99,71	126.235.042		17,83

2.16.01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	5	14.000.000			1	8.400.000	1	8.400.000	100	100	12 Bulan	8.400.000	100	8.400.000		19,42
2.16.01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	60 Bulan	24.323.101			12 Bulan	15.322.901	12	14.890.185	97,18	98	12 Bulan	19.803.878	98,14	19.435.042		22,11
2.16.01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Bulan	350.000.000			12 Bulan	259.395.600	12	256.571.600	98,21	98	9	98.400.000	100	98.400.000		17,47
2.16.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	47.500.000			100	48.462.450	100	48.094.450	99,24	100	100	26.606.750	98,77	26.278.413		21,63

2.16.01. 2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Biaya Peemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opertasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	25 Unit				5 Unit	31.969.450	5	31.960.450	100	100	5 Unit	26.606.220	98,77	26.278.413		
2.16.01. 2.09. 04	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	m2	45.000.000			11 m2	15.000.00	11	14.960.000	99,73	100	0	0	0	0		0.33
2.16.01. 2.09. 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 Bulan	2.500.000			12 Bulan	1.493.000	12	1.165.000	78,03	78	0	0	0	0		0,59

2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100	3.133.566.220			100	1.533.505.470	100	1.532.440.889	99,93	100	100	1.662.114.320	99,49	1.653.665.524		0,88
2.16.02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	100	3.133.566.220			100	1.533.505.470	100	1.532.440.889	99,93	100	100	1.662.114.320	99,49	1.653.665.524		0,88
2.16.02. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	25 Dokumen				5 Dokumen	28.421.080	5	28.309.000	99,61	100	0	0	0	0		0
2.16.02. 2.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Jenis Informasi Publik yang diberikan Pelayanan	15 Jenis	146.950.600			3 Jenis	51.494.040	3	51.174.200	99,38	99	3 Jenis	22.272.480	99,42	22.144.202		0,83
2.16.02. 2.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang dilayani	200 Media	2.368.825.394			40 Media	971.687.550	40	971.612.394	99,99	100	40 Media	1.099.998.050	99,33	1.092.641.550		12,42

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024

2.16.02.2.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	35 Vendor	105.475.000				0	0	0	0	0	7 Vendor	104.378.710	99,56	103.919.672		0,98
2.16.02.2.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 Laporan	100.000.000			1 Laporan	76.624.540		76.358.010	99,65	100	1 Laporan	44.956.000	99,80	44.868.300		16,80
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	Aplikasi	1.059.098.054			100	630.522.600	100	623.767.286	99,63	100	100	546.350.820	99,62	544.253.777		17,01
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	100	1.059.098.054			100	630.522.600	100	623.767.286	99,63	100	100	546.350.820	99,62	544.253.777		17,01

2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Terkoneksi dengan Pusat Data/ Ruang Server Monitoring Jaringan Informasi	175 OPD	686.969.234			35 OPD	371.070.600	35	368.460.486	99,30	99	35 OPD	450.014.820	99,57	448.087.633		18,47
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikelola , Website yang dikelola, Perangkat Lunak dan Aplikasi yang diperbaiki, Pengadaan Hardware untuk Aplikasi egov, Pembangunan, Pengembangan/ Redesain Aplikasi	10 Aplikasi	372.128.820			2 Aplikasi	259.452.000	2 Apl	258.306.800	98,40	98	2 Apl	96.336.000	99,82	96.156.144		14,35
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	100	153.898.350			100	48.292.530		47.664.900	98,70	98	100	67.264.050	98,90	66.527.388		0,73
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten	100	153.898.350			100	48.292.530	100	47.664.900	98,70	98	45	67.264.050	98,90	66.527.388		0,73

2.20.02. 2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Laporan	103.147.800			4 Laporan	28.123.200	4	27.835.400	98,98	98	4 Laporan	63.234.050	99,48	62.907.388		0,78
2.20. 02. 2.01. 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	5 Laporan	32.000.000			1 Laporan	20.169.330	1	19.829.500	98,32	98	0	0	0	0		0
2.20. 02. 2.01. 05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Jenis Infrastruktur yang dikembangkan	Laporan	18,750.55			0	0	0	0	0	0	2 Laporan	4.030.000	0	3.620.000		0,58
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (MAKI)	level	86.191.880			100	72.478.440	100	71.424.950	98,55	98	1 Level	74.723.250	99,09	74.046.500		
2.21.02. 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk	level	86.191.880			100	38.798.770	100	36.265.850	98,63	98	1 Level	74.723.250	99,09	18.340.900		0,78

	Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten																
2.21.02.2.01. 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditetapkan	5 Dokumen	25.500.000			1 Dok	14.045.000	1	13.766.400	98,02	98	1 Dokumen	2.475.000	100	2.475.000		11,76
2.21.02.2.01. 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	5 Dokumen	18.550.550			1 Dok	5.260.000	1	5.231.200	99,45	99	0	0	0	0		0,28
2.21.02. 2.01. 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 laporan	28.850.750			1 Laporan	11.759.000	1	11.759.000	100	100	0	0	0	0		0,40
2. 21.02. 2.01. .04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang disediakan	5 jenis	15.340.580			1 Jenis	7.734.770	1	7.509.250	97,08	97	1 Jenis	16.223.000	97,80	15.865.900		14,66

2.21.02. 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi	35 OPD	50.235.600			100	33.679.670	100	33.159.100	98,45	98	35 OPD	56.025.250	99,43	55.705.600		20,11
2.21. 02. 2. 02. 01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	20 laporan	50.235.600			4 Lap	33.679.670	4	33.159.100	98,45	98	4 Laporan	56.025.250	99,43	55.705.600		20,11

Belopa, 2023
**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kab. Luwu**

Ir. H. MUHAMMAD
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660615 199309 1 002

2.2. Analisis Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu yang memiliki berbagai program dan kegiatan khususnya dibidang komunikasi dan informatika, tentunya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak bisa lepas dari pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal.

Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal sesuai standar nasional, perlu didukung dengan upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada indikator sasaran persentase. Sedangkan Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci serta disajikan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu sejauh ini untuk realisasi capaian kinerja hampir keseluruhan dapat terlaksana tetapi ada beberapa permasalahan :

1. Kurang matangnya pada perencanaan awal anggaran sehingga ada beberapa kegiatan PPTK yang tidak dapat terlaksana. Untuk mengatasi hal-hal dimaksud dilakukan pembinaan dan membuat rencana aksi sekaligus time schedule dan rencana biaya tiap kegiatan.
2. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi dari berbagai media kurang diikuti kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Untuk mengatasi hal dimaksud diadakan pelatihan SDM untuk aplikasi pemerintahan yang diikuti oleh semua Perangkat Daerah mulai dari unsur pimpinan sampai kepada staf.
3. Belum tersusunnya berbagai pedoman pelaksanaan kegiatan, antara lain : Terlambatnya Penetapan Pengelola Web pada masing-masing Perangkat Daerah, Pengelolaan PPID, Pedoman Pengelolaan LPPL.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel Analisis Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah sesuai tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (2019)	Data	
				2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	51,78 (CC)	60,04 (B)	73,00 (BE)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Elektronik	Meningkatkan Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi E-Government pada Layanan Pemerintahan Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,53	2,0	2,5
		Persentase Pengelolaan Komunikasi Pemerintah Daerah	60	65	70
	Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral	Persentase Sistem Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	35	50	60
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Persandian Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	90	90	90

2.3. Isu-isu Penting Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembangan Komunikasi dan Informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen-elemen dalam tata kelola komunikasi, yakni sumber berita / informasi, penerima berita / informasi, substansi berita / informasi dan saluran berita / informasi yang terbingkai dalam sistem. Dari elemen-elemen tersebut, ternyata terdapat beberapa isu sebagai berikut :

- a. Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu maupun Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, masih terdapat kendala dalam pengumpulan data informasi yang akurat, realibel, lengkap dan benar.
- b. Substansi berita/ informasi yang disampaikan masih terdapat kekurangan sinkronan dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna antara Perangkat Daerah
- c. Belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung terselenggaranya pemerintah yang efektif baik dan bersih.
- d. Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna teknologi informatika.

Terkait Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik dimasukkan sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik efisien dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintah dan publik berbasis TIK. Namun untuk menerapkan hal ini sangat terkait dengan kesiapan tata kelola pemanfaatannya, Infrastrukturnya , sumber daya aparaturnya dan masyarakat sebagai pengguna (User).

Dalam pengembangan Informasi Teknologi Kabupaten Luwu tahun 2024 akan mengimplementasikan rencana kegiatan TIK yang tertuang pada Grand Desain TIK yang telah disusun, yaitu :

- a. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola E-Government

- b. Restrukturisasi Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk Penguatan Peran TIK
- c. Perencanaan dan Sosialisasi Pengembangan SDM Bidang TIK
- d. Pengembangan Aplikasi untuk Kluster Industri Pangan, Energi dan Perizinan
- e. Menyiapkan Back-up Data
- f. Menyusun Kebijakan Standarisasi Data untuk semua Perangkat Daerah
- g. Optimalisasi Jaringan dan Rekonfigurasi Data Center.

Tuntutan dan sikap perilaku pada kalangan aparatur pemerintahan dan masyarakat dengan diterapkannya E-Government merupakan aspek yang mempunyai resistansi yang cukup besar dan perlu waktu serta proses untuk mengubahnya secara bertahap. Dinas Kominfo yang memiliki fungsi pelayanan publik yakni layanan informasi dan layanan TIK berupaya memberikan pelayanan pada masyarakat yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat terwujud dengan baik sesuai amanat UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada akhirnya diharapkan manfaat informasi dapat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi menuju Luwu yang lebih maju dan sejahtera.

Disamping itu guna pencapaian tujuan dan sasaran serta tercapainya indikator meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, perlu diadakan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, yakni lebih menekankan pada fungsi Komunikasi dengan penguatan teknologi dan Informatika.

1. Rumusan akar masalah yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis sebagaimana diuraikan di bawah ini.
 - a. Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu mengalami kekurangan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana. Dari segi SDM, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu masih kekurangan Pegawai PNS

sebanyak 26 orang sedangkan dari segi sarana dan prasarana masih sangat kurang, khususnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung teknis kegiatan diseminasi informasi.

b. Belum baiknya tata kelola dan penatausahaan PPID

Tata kelola dan penatausahaan PPID belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan karena kelembagaan PPID baru dibentuk pada tahun 2018 sehingga penyelenggaraan kegiatan belum maksimal. Terkait dengan hal ini pada periode pembangunan ke depan mulai difokuskan pada peningkatan tugas dan fungsi PPID.

c. Masih kurangnya pelibatan masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu partner pemerintah dalam diseminasi informasi belum terbentuk di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu untuk periode ke depan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu akan memfokuskan pada pembentukan KIM pada tingkat kecamatan.

d. Belum maksimalnya hasil kerja tim media center

Hasil kerja Tim Media Center belum maksimal dikarenakan sarana dan prasaran yang ada belum mendukung. Oleh karena itu untuk periode ke depan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu akan memfokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan teknis.

e. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan pelayanan e-government

Infrastruktur pendukung pelayanan e-government yang ada saat ini belum memadai. Infrastruktur yang masih kurang antara lain jaringan ke perangkat daerah yang belum terbangun secara keseluruhan. Oleh karena itu ke depan pemenuhan ketersediaan infrastruktur menjadi prioritas.

f. Kurangnya pemahaman aparatur dibidang statistik sektoral

Statistik sektoral adalah salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. Dalam hal penyediaan data statistik sektoral belum terlaksana dengan baik karena sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas ini belum terpenuhi baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu ke depan peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang menangani statistik sektoral menjadi fokus perhatian selain penyediaan data.

g. Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik aparatur yang memiliki kualifikasi sandi, tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian.

Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu mengalami kekurangan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana. Dari segi SDM, Aparatur yang memiliki pemahaman dalam hal persandian untuk pengamanan informasi masih sangat kurang. Selain itu tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian yang ada masih jauh dari standar yang seharusnya. Sehingga untuk periode ke depan urusan persandian difokuskan pada peningkatan sumber daya.

Berbagai permasalahan diatas berpotensi menjadi penghambat Pemerintahan Kabupaten Luwu dalam melakukan proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif serta profesional melalui pemanfaatan TIK dalam penyebaran informasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, apabila permasalahan ini tidak diantisipasi dengan baik, akan berdampak buruk terhadap, antara lain :

- 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 terutama pada Misi ke 1 yakni 'Mewujudkan pemerintahan yang professional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel'.
- 2) Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni

Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

2. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan pelayananan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, baik internal maupun eksternal. Faktor tersebut dapat menunjang dan dapat pula menghambat, sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi agar melahirkan rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Analisis yang dilakukan berdasarkan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara

1) Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a) Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia,
- b) Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi,
- c) Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pita lebar (Palapa Ring),
- d) Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi,
- e) Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas,
- f) Tingginya tingkat persaingan antar penyelenggara telekomunikasi dan rendahnya kualitas layanan,
- g) Belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional,
- h) Belum efisiennya proses perizinan spektrum frekuensi radio, dan
- i) Belum terintegrasinya Database dan Layanan e-Government Pemerintah Pusat dan Daerah.

2) Peluang

Peluang yang mendukung untuk lima tahun ke depan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu :

- a) Makin diminatinya transaksi Jual Beli melalui Internet,
- b) Digitalisasi Penyiaran TV berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, infrastruktur industri penyiaran dan membuka peluang usaha baru.

2.4. Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi lima tahun ke depan untuk DKISP Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

- a. Cepatnya perkembangan teknologi informasi mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarana;
- b. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian perdesaan.

2. Peluang

Peluang yang mendukung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan kebijakan dan pendanaan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan,

- c. Meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk di bidang komunikasi dan informatika.

3. Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- 2) Masih adanya tumpang tindih sebagian tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi publik.
- 3) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan urusan komunikasi informasi dan informatika, statistik dan persandian.
- 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- 5) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur penunjang penyelenggaraan layanan E-Government.
- 6) Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan.
- 7) Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah terhadap keamanan informasi daerah.
- 8) Belum optimalnya keterhubungan perangkat daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi.
- 9) Ketersediaan infrastruktur dalam bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Luwu belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi.
- 10) Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.

- 11) Masih terjadi kesenjangan informasi di masyarakat, sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.

b. Peluang

Peluang yang mendukung untuk lima tahun ke depan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, yaitu :

- 1) Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- 3) Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
- 4) Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.

Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu 2019-2024 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan agar diseminasi informasi, ketersediaan data statistik sektoral dan keamanan informasi dapat tercapai. Maksud dari peningkatan kualitas adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

b. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wajib diketahui oleh masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan valid. Terkait dengan hal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus melakukan perbaikan kualitas diseminasi informasi dengan meningkatkan sumber daya internal dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat.

c. Optimalisasi Pelayanan E-Government

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Selain peningkatan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, pemanfaatan TIK untuk dapat memberikan kemudahan kepada aparatur maupun masyarakat

dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya juga menjadi tuntutan berbagai kalangan pada masa ini. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur e-government menjadi suatu keharusan.

d. Optimalisasi Penyediaan dan Pengelolaan Data Statistik Sektor

Data Statistik Sektor merupakan suatu yang sangat penting dan mendasar bagi seorang kepala daerah dalam mengambil kebijakan agar kebijakan yang diambil tepat guna dan sasaran. Ketersediaan data statistik sektor menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

e. Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Data / Informasi Pemerintah Daerah.

Pengamanan Informasi merupakan pengembangan dari penyelenggaraan persandian. Hal ini dikarenakan tuntutan perubahan zaman yang begitu cepat khususnya dalam hal cyber. Berbagai kejadian yang terjadi dimana banyaknya data-data pemerintah dan masyarakat yang dirusak dan atau diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sudah sangat meresahkan sehingga keamanan data dan informasi harus menjadi prioritas. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai perangkat daerah yang menangani urusan tersebut dituntut untuk dapat mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan meningkatkan sumber daya.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami kenaikan pagu dan rancangan awal RKPD, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya masih minimnya anggaran tiap kegiatan yang menjadi skala prioritas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berimbas pada pelayanan dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak berjalan maksimal sesuai yang direncanakan. Adapun program dan kegiatan tersebut sudah sesuai namun besaran pagu terjadi peningkatan pagu yang nantinya yang akan dipilah sesuai

dengan skala prioritas dengan tiap bidang dalam mengelola program yang akan dijabarkan dan dilaksanakan.

Alasan Proses dilakukan karena tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang semakin kompleks yang dengan sendirinya menuntut kinerja dan pelayanan maksimal sehingga rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengalami peningkatan dari rancangan pagu sebelumnya

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu disusun dengan memperhatikan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD) yang telah disusun dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dan kebutuhan disajikan dalam tabel TC.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anal		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Inc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA		Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.209.676.019	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA		Caku Kete Pen Pela Urus Pem Daer
2.16.01.2.01	Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah	Belopa	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Secara Tepat Waktu	100 %	40.579.890	Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah	Belopa	Pers Pen Dok Pere seca

2.16.01.2.01	01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	27.111.525	01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun
2.16.01.2.01	02.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor DKISP	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.586.750	02.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor DKISP	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun
2.16.01.2.01	07.Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kantor DKISP	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan yang disusun	1 Dokumen	7.881.615	07.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan yang disusun
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	3.149.253.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu
2.16.01.2.02	01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DKISP	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	35 Orang	3.137.939.000	01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DKISP	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan
2.16.01.2.02	05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	5.138.000	05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan yang disusun	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
2.16.01.2.02	07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kantor DKISP	Jumlah laporan keuangan bulanan /semesteran yang disusun	14 Laporan	6.176.600	07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kantor DKISP	Jumlah laporan keuangan bulanan /semesteran yang disusun
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	80.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.2.05	09.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	80.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	481.987.027	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

								Daerah
2.16.01.2.06	01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor DKISP	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Jenis	6.329.400	01.Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor DKISP	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor
2.16.01.2.06	02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa	Jumlah penyediaan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Unit	140.093.990	02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
2.16.01.2.06	05.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor DKISP	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	5.500.132	05.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor DKISP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
2.16.01.2.06	06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor DKISP	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	4 Jenis	7.500.000	06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor DKISP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan
2.16.01.2.06	07.Penyediaan Bahan/ Material	Kantor DKISP	Jumlah jenis bahan/ material kebutuhan kantor yang disediakan	25 Jenis	29.721.825	07.Penyediaan Bahan/ Material	Kantor DKISP	Jumlah bahan/ material kebutuhan kantor yang disediakan
2.16.01.2.06	08.Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DKISP	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	15.999.780	08.Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DKISP	Jumlah jamuan makan dan minum yang disediakan
2.16.01.2.06	09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	42 OK	276.841.900	09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor DKISP	Jumlah perjalanan dinas luar daerah
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	380.638.052	Penunjang Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.08	01.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DKISP	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	400 Surat	12.600.000	01.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DKISP	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi
2.16.01.2.08	02.Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor DKISP	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	36.484.652	02.Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon dan listrik
2.16.01.2.08	04.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor DKISP	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	331.553.400	04.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah jasa pelayanan umum kantor

2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	75 %	77.217.450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor DKISP	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09	02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor DKISP	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	4 Unit	49.467.450	02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor DKISP	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan berkala
2.16.01.2.09	09.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor DKISP	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	11 m2	22.500.000	09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Luas bangunan gedung yang pemeliharaan
2.16.01.2.09	10.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor DKISP	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 Tahun	5.250.000	10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor DKISP	Jumlah perlengkapan gedung yang pemeliharaan berkala
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab.Luwu Belopa	Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa	100 %	3.493.065.700	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Luwu Belopa	Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Kabupaten	35 %	3.493.065.700	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Belopa	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten
2.16.02.2.01	01.Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab.Luwu Belopa	Dokumen rumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	5 Dokumen	146.123.900	01.Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Luwu Belopa	Dokumen kebijakan teknis bidang komunikasi publik
2.16.02.2.01	06.Pelayanan Informasi Publik	Kab.Luwu Belopa	Jumlah jenis informasi publik yang diberikan pelayanan	3 Jenis	111.030.000	06.Pelayanan Informasi Publik	Kab. Luwu Belopa	Jumlah informasi publik yang pelayanan
2.16.02.2.01	07.Layanan Hubungan Media	Kab.Luwu Belopa	Jumlah media yang dilayani	40 Media	2.500.000.000	07. Layanan Hubungan Media	Kab. Luwu Belopa	Jumlah media yang dilayani
2.16.02.2.01	10.Penguatan Kapasitas Sumber Daya	Kab.Luwu	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang	1 Laporan	100.000.000	10.Penguatan Kapasitas Sumber	Kab. Luwu	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang

	Komunikasi Publik	Belopa	ditingkatkan kapasitasnya			Daya Komunikasi publik	Belopa	yang kapa
2.16.02.2.01	11.Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Kab.Luwu Belopa	Laporan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	12 Laporan	135.911.800	11.Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Kab. Luwu Belopa	Lapo peny hubu masi dan kom
2.16.02.2.01	12.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Kab.Luwu Belopa	Laporan hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	4 Laporan	500.000.000	12.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Luwu Belopa	Lapo peny hubu masi dan kom
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab.Luwu Belopa	Jumlah Aplikasi dalam rangka e-Gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	1 Aplikasi	1.236.986.600	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Luwu Belopa	Jum dal Gov digu Kab
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	Kab.Luwu Belopa	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	90 %	1.236.986.600	Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Luwu Belopa	Caku Peny Peng Gov dilin Kab
2.16.03.2.02	03.Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Belopa	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dengan pusat data/ ruang server monitoring jaringan informasi	35 OPD	867.220.600	03.Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Belopa	Jum daer terko pusat serv jaring
2.16.03.2.02	07.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab.Luwu Belopa	Jumlah aplikasi yang dikelola,webside yang dikelola perangkat lunak dan aplikasi yang diperbaiki, pengadaan Hardware untuk aplikasi e-Gov, pembangunan /pengembangan/ redesain aplikasi	2 Aplikasi	369.766.000	07.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Luwu Belopa	Jum yang websi dikel lunak yang peng Harc aplik pem peng sain

2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Luwu Belopa	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	45 %	261.820.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Luwu Belopa	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Belopa	Sistem Data dan Statistik Sektoral	66 %	261.820.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/kota	Kab. Luwu Belopa	Sistem Data dan Statistik Sektoral
2.20.02.2.01	01.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengola han,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi,pengumpul an,pengolahan ,analisis dan diseminasi data statistik sektoral	4 Laporan	85.400.000	01.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengola han,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Luwu Belopa	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi,pengumpul an,pengolahan ,analisis dan diseminasi data statistik sektoral
2.20.02.2.01	03.Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Luwu Belopa	Metadata statistik sektoral yang dibangun	1 Metadata	15.200.000	03.Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Luwu Belopa	Metadata statistik sektoral yang dibangun
2.20.02.2.01	04.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Luwu Belopa	Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	1 Laporan	37.150.000	04.Peningkatan kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Luwu Belopa	Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
2.20.02.2.01	06.Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral	Kab. Luwu Belopa	Laporan pelaksanaan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah	1 Laporan	15.320.000	06.Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral	Kab. Luwu Belopa	Laporan pelaksanaan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Luwu Belopa	Indeks Kematangan Keamanan Informasi(MAKI)	100 %	95.398.523	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Luwu Belopa	Indeks Kematangan Keamanan Informasi(MAKI)
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab.Luwu Belopa	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten	100 %	61.254.534	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Luwu Belopa	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten

2.21.02.2.01	01.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunkaasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Belopa	Dokumen kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring sandi pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1 Doku	16.188.689	01.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Belopa	Doku tata kean dan kom pem kabu
2.21.02.2.01	02.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Belopa	Dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten	1 Doku	10.679.350	02.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Luwu Belopa	Doku kebu peng daya infor pem kabu
2.21.02.2.01	03.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Luwu Belopa	Laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	25.350.248	03.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Luwu Belopa	Lapo pela kean pem daer berb dan
2.21.02.2.01	04.Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Belopa	Jumlah jenis layanan keamanan informasi pemerintah daerah yang disediakan	1 Jenis	9.036.247	04.Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Luwu Belopa	Jum laya infor pem kabu dised
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Belopa	Persentase Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah	100 %	34.143.989	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kab/Kota	Kab. Luwu belopa	Inde Kem Kear Infor
2.21.02.2.02	01.Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Belopa	Laporan pelaksanaan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten	4 Laporan	34.143.989	01.Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Belopa	Lapo pela kom pem kabu
			JUMLAH		9.035.388.662			JUM

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan usulan masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang ditujukan kepada perangkat daerah yang membidangi fasilitasi pengadaan menara/ tower jaringan seluler dengan melihat

usulan masyarakat yang sangat urgen dan sangat memerlukan perhatian berdasarkan skala prioritas.

Kesesuaian usulan yang dimaksud dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni memberikan pelayanan dan pemerataan informasi serta pemenuhan hak publik akan informasi dapat terwujud dengan baik. Keterkaitan dengan kesesuaian usulan tersebut dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sangat sejalan yakni informasi dan komunikasi publik untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC.32 sebagai berikut :

Tabel TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitasi Pengadaan Jaringan Internet/ Wifi	1. Bukit Harapan, Kecamatan Bua	Terkoneksinya Jaringan Informasi dan Komunikasi Pelayanan Publik	1 Paket	
		2. Desa Salubua, Kec. Suli Barat		1 Paket	
		3. Desa Bonelemo Utara, Kecamatan Bajo		1 Paket	
		4. Dusun Muhajirin, Dusun Malewong, Dusun Palakka.		3 Paket	
		5. Desa Kanna Utara Kec. Bastem		1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu mengacu kepada kebijakan nasional membangun sektor telekomunikasi dan tata kelola internet sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan diharapkan dapat dijadikan acuan secara konsisten sehingga sasaran pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika masalah sosial dan budaya tetap diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan ekonomi digital dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kondisi lokal dan penggunaan teknologi yang sudah dibangun. Dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

Terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu berupaya memasukkan dalam program/ kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kabupaten Luwu telah merumuskan strategi pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberian informasi pada masyarakat dengan Pemerintah secara transparan dan efisien
2. Menyediakan sistem informasi berbasis elektronik agar tercipta proses kerja yang transparan, efisien dan mudah diakses.

3.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Sebagai penjabaran dan implementasi atas pernyataan misi I RPJMD perlu dirumuskan tujuan sebagai sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuannya berdasar Misi I adalah Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, seperti tertuang dalam Renstra 2019-2024 adalah :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatkan Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi E-Government pada layanan Pemerintah Daerah.
- c. Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral.
- d. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Pemerintah.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu sesuai analisa kebutuhan untuk tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu melaksanakan 5 program dan 32 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,** dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan / Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Pengembangan Infrastruktur

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Kab. Luwu Belopa		6.430.571.243	APBD		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.387.257.750
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Belopa	100 %	3.375.972.213	APBD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.840.995.040
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	Kab. Luwu Belopa	100 %	24.257.020	APBD		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.176.840
2.16.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Kab. Luwu Belopa	2 Dokumen	19.250.000	APBD		Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	24.074.350
2.16.01.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu Belopa	1 Dokumen	5.007.020	APBD		Cakupan Kertersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	7.102.490

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024

2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Belopa	100 %	3.375.705.200	APBD		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.375.705.200
2.16.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kab. Luwu Belopa	33 OB	3.137.939.000	APBD		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.137.939.000
2.16.01.2.02.03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	Luar Kab. Luwu	OB	222.526.000	APBD		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.526.000
2.16.01.2.02.05	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	Kab. Luwu Belopa	1 Laporan	2.170.600	APBD		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.170.600
2.16.01.2.02.07	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Kab. Luwu Belopa	14 Laporan	13.069.600	APBD		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.069.600
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Belopa	100 %	222.563.946	APBD		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	294.113.000
2.16.01.2.06.02	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Luwu Belopa	4 Unit	936.896	APBD		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.103.000
2.16.01.2.06.04	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Belopa	12 Bulan	4.990.500	APBD		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah	4.999.850

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024

2.16.01.2.06.05	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu Belopa	12 Bulan	3.498.000	APBD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah	3.750.600
2.16.01.2.06.06	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu Belopa	12 Bulan	2.000.000	APBD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah	3.000.000
2.16.01.2.06.07	5	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/ Material Kebutuhan Perkantoran dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu Belopa	12 Bulan	9.143.550	APBD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah	11.259.600
2.16.01.2.06.09	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/ diikuti	Kab. Luwu Belopa	42 OK	199.999.000	APBD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah	250.000.000
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Belopa	100%	131.359.047	APBD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.723.101
2.16.01.2.08.02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan yang disediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Belopa	12 Bulan	24.559.047	APBD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.323.101
2.16.01.2.08.04	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Belopa	8 OB	106.800.000	APBD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.400.000
2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Belopa	100 %	33.087.000	APBD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000
2.16.01.2.09.02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	Kab. Luwu Belopa	5 Unit	28.087.000	APBD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.000.000
2.16.01.2.09.06	2	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu belopa	4 Unit	5.000.000	APBD	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024

2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Luwu Belopa	100 %	2.198.213.380	APBD		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.258.112.580
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Kab. Luwu Belopa	35 %	2.198.213.380	APBD		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.258.112.580
2.16.02.2.01.04	1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik yang dikelola	Kab. Luwu Belopa	100 Konten	429.322.600	APBD		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	410.500.000
2.16.02.2.01.06	2 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik yang dilakukan pelayanan	Kab. Luwu Belopa	3 Layanan	110.680	APBD		Persentase Layanan Publik diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	51.639.080
2.16.02.2.01.07	3 Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang dilayani	Kab. Luwu Belopa	40 Media	1.650.003.400	APBD		Persentase Layanan Publik diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	1.650.003.400
2.16.02.2.01.08	4 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Luwu Belopa	7 Vendor	100.487.900	APBD		Persentase Layanan Publik diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	120.000.000
2.16.02.2.01.10	5 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Laporan Sumber Daya Komunikasi Publik yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Luwu Belopa	1 Laporan	18.288.800	APBD		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	25.970.100
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Aplikasi dalam rangka E-Gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	Kab. Luwu Belopa	1 Aplikasi	447.385.650	APBD		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	895.035.100
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Luwu Belopa	90 %	447.385.650	APBD		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	895.035.100

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024

2.16.03.2.02.01	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kab.Luwu Belopa	2 Laporan	525.600	APBD	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	2.500.000
2.16.03.2.02.03	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Terkoneksi dengan Pusat Data/ Ruang Server monitoring Jaringan Informasi	Kab.Luwu belopa	35 OPD	335.441.850	APBD	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	532.060.100
2.16.03.2.02.07	3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikelola, Website yang dikelola, Perangkat Lunak dan Aplikasi yang diperbaiki, Pengadaan Hardware untuk Aplikasi E-Gov, Pembangunan/ Pengembangan/ Redesain Aplikasi	Kab.Luwu Belopa	2 Aplikasi	104.475.000	APBD	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	110.475.000
2.16.03.2.02.09	4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas yang dikembangkan dan dikelola	Kab.Luwu Belopa	1 Laporan	6.943.200	APBD	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	250.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Sistem Data Statistik yang terintegrasi	Kab.Luwu Belopa	45 %	18.378.200	APBD	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	294.283.300
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	66 %	18.378.200	APBD	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	294.283.300
2.20.02.2.01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab.Luwu Belopa	4 Laporan	18.378.200	APBD	Persentase OPD yang menggunakan Data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	40.283.300

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024

2.20.02.2.01.07	2	Pengembangan infrastruktur	Jumlah Jenis Infrastruktur yang dikembangkan	Kab.Luwu Belopa	1 Jenis	280.000.000	APBD	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Informasi (MAKI)	Kab.Luwu Belopa	Level I	35.194.050	APBD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	98.831.730
2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab.Luwu Belopa	100 %	4.522.000	APBD	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	64.531.480
2.21.1.02.2.01.0 1	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditetapkan	Kab.Luwu Belopa	1 Dokumen	2,550.000	APBD	Tingkat Kematangan Informasi Pemerintah	14.551.390
2.21.1.02.2.01.0 4	4	Penyediaan Layanan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab.luwu Belopa	35 OPD	1.972.000	APBD	Tingkat Kematangan Informasi Pemerintah	40.058.170
2.21.02.2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pola Hubungn Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Kab.Luwu Belopa	100 %	30.672.050	APBD	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	34.300.250
2.21.02..2.02.01	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab.Luwu Belopa	1 Laporan	30.672.050	APBD	Tingkat Kematangan Informasi Pemerintah	34.300.250

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	Program/egiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2024			
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.118.126.135	Kab.Luwu Belopa	APBD Kab
	a Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	32.891.800	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	27.307.200	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.584.600	Kab. Luwu	APBD Kab
	b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.602.848.282	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	35 OB	3.400.641.984	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	OB	188.120.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	3.096.655	Kab.Luwu	APBD Kab
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran yang disusun	14 Laporan	10.990.189	Kab. Luwu	APBD Kab
	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	505.259.668	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diisediakan	Unit/Set	184.922.956	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	3.969.100	Kab. Luwu	APBD Kab

	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	2.250.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	4.000.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyediaan Bahan / Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1(satu) tahun	OB	10.728.412	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/ diikuti	42 OK	299.389.200	Kab. Luwu	APBD Kab
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	128.959.045	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi ,air dan listrik perkantoran	12 Bulan	24.559.045	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	104.400.000	Kab. Luwu	APBD Kab
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	33.088.750	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan	4 unit	28.088.750	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	5.000.000	Kab. Luwu	APBD
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	91,6 %	1.870.500.20650	Kab. Luwu	APBD Kab
a	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Komunikasi Informasi Daerah dan Media Massa	35 %	1.870.500.206	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Pengelolaan Konten dan Perencanaan media Komunikasi Publik	Jumlah konten dan perencanaan media komunikasi publik yang dikelola	100 Konten	352.355.200	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Pelayanan Informasi Publik	Jumlah jenis informasi publik yang diberikan pelayanan	3 Jenis	18.282.952	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang dilayani	40 Media	1.499.752.278	Kab. Luwu	APBD Kab

	- Penguatan Kapasitas Sumber Daya komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Laporan	109.775	Kab. Luwu	APBD Kab
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Kabupaten	90,9 %	447.922.194	Kab. Luwu	APBD Kab
	a Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dalam rangka E-Gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	1 Aplikasi	447.922.194	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penatalaksaas dan Pengawasan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Laporan	641.394	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dengan pusat data/ ruang server monitoring jaringan informasi	35 PD	336.159.300	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola, website yang dikelola, perangkat lunak dan aplikasi yang diperbaiki, pengadaan hardware untuk aplikasi e-gov, pembangunan / pengembangan / redesain aplikasi	2 Aplikasi	104.210.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Ekosistem Kabupaten cerdas dan kota cerdas yang dikembangkan	1 Laporan	6.911.500	Kab. Luwu	APBD Kab
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten	66,7 %	18.443.832	Kab. Luwu	APBD Kab
	a Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	45 %	18.443.832	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	4 Laporan	18.443.832	Kab. Luwu	APBD Kab
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	35.205.925	Kab. Luwu	APBD Kab
	a Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100 %	4.447.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten yang ditetapkan	1 Dokumen	2.360.000	Kab. Luwu	APBD Kab

	Kabupaten/ Kota					
	- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah jenis layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten yang disediakan	1 Jenis	2.087.000	Kab. Luwu	APBD Kab
	b Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kematangan Informasi (MAKI)	Level I	30.758.925	Kab. Luwu	APBD Kab
	- Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten /Kota	Laporan pelaksanaan operasionalisasi jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten	4 Laporan	30.758.925	Kab. Luwu	APBD Kab
		JUMLAH		6.490.198.292		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2023, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belopa, 2023

**Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan
Persandian**

**Ir. H. Muhammad
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 19660615 1999309 1 002**